



# **RISALAH**

## **RAPAT PARIPURNA**

### **DPRD KABUPATEN MALANG**

**HARI : SENIN**

**TANGGAL : 27 APRIL 2023**

**PUKUL : 09.00 WIB**

**AGENDA :**

- 1. PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN  
KETIGA TAHUN KEEMPAT ANGGOTA  
DPRD KABUPATEN MALANG MASA  
JABATAN 2019-2024**
- 2. PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA  
KHUSUS PEMBAHAS LKPJ BUPATI  
MALANG TAHUN 2022**

## A. PIMPINAN RAPAT



**Nama : Ir. H.M. KHOLIQ**

**Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MALANG**

## B. SEKRETARIS RAPAT



**NAMA : BAGUS SULISTYAWAN, A.P, M.Si**

**Jabatan : SEKRETARIS RAPAT**

### C. ANGGOTA SESUAI FRAKSI

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN	PARTAI
1	DARMADI, S.Sos.	Ketua DPRD	PDI.P
2	SODIKUL AMIN	Plt.Ketua	NASDEM
3	Ir. H.M. KHOLIQ	Wakil Ketua	PKB
4	MISKAT , SH.MH	Wakil Ketua	GOLKAR
5	VENNY AYU SORAYA	Anggota	PDI.P
6	Hj.SUMA'I	Anggota	PDI.P
7	FATHUR ROHMAN , S.Pd.I	Anggota	PDI.P
8	BUSILAN , S.H	Anggota	PDI.P
9	Ir. BUDI KRISWIYANTO	Anggota	PDI.P
10	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H	Anggota	PDI.P
11	Dr. TANTRI BARAROH, SE, M.Si., M.AK.	Anggota	PDI.P
12	Dra. Hj.TUTIK YUNARNI	Anggota	PDI.P
13	RENI PUWINING TYAS	Anggota	PDI.P
14	WAHYU INDRIYATI	Anggota	PDI.P
15	YULIS FARIDA, SH	Anggota	PDI.P
16	MUHAMMAD UKHROWI, S.Sos.	Anggota	PKB
17	KUNCORO, S.H	Anggota	PKB
18	NOFAN EKO PRASETYO	Anggota	PKB
19	MAHRUS ALI	Anggota	PKB
20	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	Anggota	PKB
21	Drs. ABDUL ROKHIM	Anggota	PKB
22	MUSLIMIN, S.Pd.	Anggota	PKB
23	SUSIYONO	Anggota	PKB
24	ABDULLOH SATAR	Anggota	PKB
25	Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	Anggota	PKB
26	ALI MURTADLO, S.H	Anggota	PKB
27	AHMAD FAUZAN, S.Sos.	Anggota	GOLKAR
28	DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.Ap.	Anggota	GOLKAR
29	SUDARMAN, S.Pd.	Anggota	GOLKAR
30	DOFIC SOROANGGOMO	Anggota	GOLKAR
31	M. KHOIRUN, S.E	Anggota	GOLKAR
32	Ir. SUDJONO,MP	Anggota	GOLKAR
33	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	Anggota	GOLKAR
34	NINIK NURMIATI	Anggota	NASDEM
35	SA'RONI	Anggota	NASDEM
36	ABDUL GHOFUR	Anggota	NASDEM
37	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	Anggota	NASDEM
38	MUHAMMAD FAIZ, S.E.	Anggota	NASDEM
39	AMARTA FAZA, S.T.	Anggota	NASDEM
40	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	GERINDRA
41	RAHMAT KARTALA	Anggota	GERINDRA
42	FITRI YUHANA	Anggota	GERINDRA
43	UNGGUL NUGROHO, S.Si.	Anggota	GERINDRA
44	MOHAMMAD. SAIFUL EFFENDI	Anggota	GERINDRA

45	ZIA'UL HAQ	Anggota	GERINDRA
46	YAZID SALIM, S.E.	Anggota	GERINDRA
47	H. AHMAD DANİYAL	Anggota	PPP
48	M. TAUFIQ, S.PD.I	Anggota	PPP
49	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	Anggota	DEMOKRAT
50	SUTRISNO, S.H.	Anggota	HANURA
<b>Jumlah</b>		<b>50 orang</b>	<b>8 PARDOL</b>

#### D. SAMBUTAN KETUA DPRD KABUPATEN MALANG



- **ASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.**
- **SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA,**
- **OM SWASTYASTU,**
- **NAMO BUDDHAYA,**
- **SALAM KEBAJIKAN,**
- **RAHAYU.**

SESUAI CATATAN DI SEKRETARIAT DPRD, DARI 50 ORANG ANGGOTA DPRD YANG TELAH MENANDATANGANI DAFTAR HADIR ADA 33 ORANG, DENGAN DEMIKIAN TELAH MEMENUHI KUORUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 131 AYAT (1) HURUF c, PERATURAN DPRD KABUPATEN MALANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN MALANG, MAKA DENGAN MENGUCAP **“BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM”**

RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI, SENIN, 17 APRIL 2023, SAYA NYATAKAN DIBUKA .... **(TOK!!! 1 X)**

YANG TERHORMAT,

SDR. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG;

SDR. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG, PARA KABAG, PARA KASUBAG BESERTA STAF;

HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI, KITA PATUT MENGUCAP PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS BERKAT RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA, KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA TETAP TERLIMPAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD S.A.W, BESERTA KELUARGA, SAHABAT SERTA PENERUS PERJUANGANNYA.

ATAS NAMA PIMPINAN DPRD, KAMI MENGUCAPKAN “*SELAMAT IDUL FITRI 1444 H, TAQABBALALLAHU MINNA WA MINKUM. TAQABBAL YAA KARIM, MOHON MAAF ATAS SEGALA KESALAHAN DAN KEKHILAFAN LAHIR DAN BATIN.*”

DAN KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS KEHADIRAN ANGGOTA DPRD DALAM RAPAT PARIPURNA HARI INI.

***RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,***

SESUAI HASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH TANGGAL 27 MARET 2023, MAKA, AGENDA RAPAT PARIPURNA HARI INI, ADALAH :

- 1. PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN KEEMPAT ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG MASA JABATAN 2019-2024.**
- 2. PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PRETANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG TAHUN 2022.**

**BAPAK, IBU HADIRIN SEKALIAN,**

SEBELUM MEMASUKI ACARA PERTAMA, BAHWA, BERDASARKAN PASAL **121 AYAT (4)** PERATURAN DPRD KABUPATEN MALANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD, DISEBUTKAN :

ANGGOTA DPRD WAJIB MELAPORKAN PELAKSANAAN RESES KEPADA PIMPINAN DPRD, PALING SEDIKIT MEMUAT :

- a. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN RESES;
- b. TANGGAPAN, ASPIRASI DAN PENGADUAN DARI MASYARAKAT; DAN
- c. DOKUMENTASI PESERTA DAN KEGIATAN PENDUKUNG.

UNTUK ITU, MEMASUKI ACARA YANG PERTAMA, MARI KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN LAPORAN TERTULIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN KEEMPAT ANGGOTA DPRD KEPADA PIMPINAN DPRD.

KEPADA ANGGOTA DPRD YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI PERWAKILAN, DIPERSILAHKAN UNTUK MELAPORKAN.....

*.....Proses Penyampaian Laporan Tertulis Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun Keempat Anggota DPRD Kepada Pimpinan DPRD.....*





**Assalamu'alaikum. wr, wb.**

***Selamat Pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian,***

Yang terhormat,

Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten  
Malang Rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten  
Malang;

Sekretaris DPRD Kabupaten Malang, Para Kabag, Para Kasubag beserta staf

Mengawali penyampaian Laporan Tertulis Pelaksanaan Kegiatan Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun Keempat Anggota DPRD Kabupaten Malang kepada Pimpinan DPRD, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, kita dapat kembali bertemu dan bertatap muka diforum yang berbahagia ini, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sholawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Tertulis atas Pelaksanaan Kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun Keempat Anggota DPRD Kabupaten Malang.

Berdasarkan pasal 121 ayat (1) s/d (5) Peraturan DPRD Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 Tata Tertib DPRD disebutkan bahwa :

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD;
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai.
- (3) Masa reses anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan :
  - a. Waktu reses anggota DPRD, pada daerah pemilihan yang sama;
  - b. Rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - c. Hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. Kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat :
  - a. Waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Reses atau Masa Reses adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD. Setiap melaksanakan tugas reses Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.



## **I. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir (Lembaran Negara Republik Indonesia dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6179);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2022;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 201 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 201 Seri A) tanggal 30 Desember 2022;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Nomor : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.34.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023;
10. Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang bulan April 2023.

Dengan dasar ketentuan peraturan perundangan tersebut diatas, maka dalam rangka menjaring dan menyerap aspirasi dari masyarakat, Anggota DPRD Kabupaten Malang melaksanakan kegiatan reses ke daerah pemilihan masing- masing.

### **1. MAKSUD DAN TUJUAN**

Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dimaksudkan untuk:

1. Mengunjungi Daerah Pemilihan;
2. Menyerap Aspirasi masyarakat;
3. Mendorong partisipasi Masyarakat untuk berperan aktif dalam Pembangunan.

### **2. ANGGARAN**

Biaya pelaksanaan kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun Keempat Anggota DPRD Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019 - 2024, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023.

### **3. PESERTA RESES**

Peserta Reses terdiri dari :

1. Anggota DPRD Kabupaten Malang sesuai dengan Daerah Pemilihan selama 2 ( dua ) hari;
2. Tokoh Masyarakat / Agama / Organisasi / Profesi / Kader beserta undangan lainnya yang berjumlah  $\pm$  200 Orang

Perlu kami sampaikan bahwa dari 50 ( Lima Puluh ) Orang Anggota DPRD Kabupaten Malang yang melaksanakan kegiatan Reses masa Persidangan Kedua Tahun Keempat sebanyak : 50 (Lima Puluh ) orang Anggota.

#### **4. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Waktu dan tempat pelaksanaan Reses Masing-masing anggota DPRD adalah sebagai berikut :

Kegiatan “RESES” Masa Persidangan Kedua Tahun Keempat Anggota DPRD Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024 secara serentak dilaksanakan pada :

Hari : Kamis dan  
Jum'at Tanggal : 13 dan 14  
April 2023

Bertempat : di Daerah Pemilihan Masing-masing

#### **PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN**

Secara umum Pelaksanaan kegiatan reses Masa Persidangan Kedua Tahun Keempat masing-masing Anggota DPRD adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian Program Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi DPRD oleh Anggota DPRD yang melaksanakan Reses;
2. Diskusi/Tanya Jawab/Penyampaian aspirasi masyarakat;
3. Penutup; dan
4. Ramah tamah.

Selain menyampaikan poin 1 s /d 3 tersebut diatas, dalam pelaksanaan Reses kali ini juga dimanfaatkan oleh Anggota yang melaksanakan kegiatan Reses untuk bersilaturahmi dan bertatap muka langsung dengan para konstituen yang ada di masing-masing Daerah Pemilihan.

#### **5. HASIL RESES**

Dari hasil reses masa Persidangan Kedua Tahun Keempat ada beberapa Aspirasi Masyarakat yang disampaikan kepada Anggota DPRD di masing - masing Daerah Pemilihan . Hal – hal yang menjadi masukan /aspirasi/ pokok – pokok pikiran dalam kegiatan reses antara lain :

1. Penguatan ketahanan ekonomi wilayah melalui peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat berbasis pada potensi unggulan daerah, serta mendorong terciptanya wirausaha kreatif untuk memberdayakan masyarakat;
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur, serta teknologi dan informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah menuju kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan antar wilayah;
3. Penguatan kualitas, kompetensi dan daya saing sumber daya manusia berbagai bidang serta peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
4. Mewujudkan keselarasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas keberlanjutan lingkungan hidup, risiko bencana dan perubahan iklim
5. Disamping 4 (empat) point tersebut diatas masih terdapat beberapa permasalahan yang disampaikan oleh konstituen pada kegiatan reses kali ini, namun karena sifatnya tidak terlalu mendesak, dapat diberikan jawaban oleh Bapak / Ibu Anggota yang melaksanakan reses.

Selain hal tersebut diatas, masih banyak hasil serap aspirasi yang tidak mungkin dipaparkan satu persatu, oleh karena itu selanjutnya tetap akan dijadikan pertimbangan dan acuan dimasa - masa yang akan datang.

## **6. REKOMENDASI / KESIMPULAN**

Semua aspirasi, masukan dan saran yang telah disampaikan oleh masyarakat kepada Anggota yang melaksanakan reses, akan ditampung untuk diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan dan yang

bersifat prioritas akan segera dikoordinasikan pada saat rapat kerja dengan Dinas / Instansi yang berkompeten dibidangnya, guna segera mendapatkan penanganan, penyelesaian dan/atau sebagai bahan pertimbangan program pembangunan yang akan datang.

Demikian Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun Keempat Anggota DPRD Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024, semoga dengan dilaksanakannya reses ini dapat menambah masukan dan aspirasi untuk pertimbangan, sehingga pembangunan di Kabupaten Malang di masa yang akan datang akan lebih berkembang.

**Kepanjen, 17 April 2023**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN MALANG**

**Ketua**

**Juru Bicara**

**DARMADI,S.Sos**

**Drs. MOKHAMMAD FAUZI,**

**RAPAT PARIPURNA DPRD, HADIRIN SEKALIAN YANG KAMI HORMATI,**

BARU SAJA KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN LAPORAN TERTULIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN KEEMPAT ANGGOTA DPRD KEPADA PIMPINAN DPRD.

KEPADA SAUDARA **Drs. MOKHAMMAD FAUZI, M.Ag** YANG MEWAKILI ANGGOTA DPRD DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.

DENGAN TELAH DISAMPAIKANNYA LAPORAN TERTULIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN KEEMPAT TADI, MAKA SAYA UMUMKAN **“MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN KEMPAT ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG MASA JABATAN 2019-2024”**

SAYA NYATAKAN DIBUKA.....TOK!!! (1X).

**RAPAT PARIPURNA DPRD, HADIRIN SEKALIAN YANG KAMI HORMATI,**

DENGAN TELAH DIBUKANYA MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN KEEMPAT ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG, MAKA MEMASUKI ACARA YANG KEDUA YAITU, PENYAMPAIAN **LAPORAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LKPJ BUPATI MALANG TAHUN 2022.**

UNTUK LAPORAN YANG PERTAMA, PANSUS PEMBAHAS LKPJ BIDANG **PEMERINTAHAN, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN** UNTUK MELAPORKAN HASILNYA.

KEPADA JURU BICARA YANG TELAH DITUNJUK, DIPERSILAHKAN....





**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat Siang dan Salam Sejahtera,**

Yang terhormat,

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Malang;

Sekretaris DPRD Kabupaten Malang beserta staf,

Mengawali Laporan Pansus LKPJ pada hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanawata'ala, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya semata, kita semua pada hari ini masih diberikan kesehatan sehinggadi Bulan Suci Romadhon tahun ini kita semua dapat hadir di forum Rapat Paripurna, dalam rangka penyampaian Laporan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2022.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman.

Seiring dengan ungkapan rasa syukur tadi, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, yang telah memberikan kesempatan kepada Panitia Khusus Pembahas LKPJ Bupati Malang Bidang Hukum, Pemerintahan dan Perundang-Undangan, untuk menyampaikan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2022.

### ***Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,***

Pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kami sampaikan bahwa, Panitia Khusus Pembahas LKPJ Bupati Malang Tahun 2022 Bidang Hukum, Pemerintahan dan Perundang-Undangan telah melaksanakan Rapat Kerja, baik internal maupun dengan Tim LKPJ Pemerintah Kabupaten Malang serta bersama Perangkat Daerah Teknis terkait, hingga kegiatan kajian terhadap LKPJ, khususnya menyangkut Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang selama Tahun 2022 yang telah berlalu.

Untuk selanjutnya, memberikan beberapa catatan-catatan evaluatif bersifat strategis yang dituangkan dalam Keputusan DPRD sebagai dokumen Pemerintah Daerah untuk dijadikan dasar dalam memperbaiki program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun berikutnya.

Dalam memberikan Catatan Strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2022, pada hakekatnya adalah merumuskan hasil monitoring dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD selama Tahun 2022. Berangkat dari perspektif ini, kemudian bagaimana merumuskan tentang pelaksanaan kebijakan di Bidang Hukum, Pemerintahan dan

Perundang-Undangan di Kabupaten Malang, selanjutnya ada beberapa aspek yang senantiasa dapat dilihat, diamati dan diukur tingkat keberhasilannya, demikian juga dapat diidentifikasi problematika permasalahannya.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, bahwa LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 - 2026, Visi Kabupaten Malang adalah, "***Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika***". dengan Misi: 1) Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya

Manusia Unggul; 2) Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila; 3) Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa, 4) Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera; 5) Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan. Hal-hal pokok dan penting yang terkandung dalam visi dan menjadi pijakan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021 - 2026 melalui **MALANG MAKMUR** (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif).

enyampaian LKPJ Tahun 2022, dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusi, yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan **progress report** atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Sedangkan mengenai muatan LKPJ dijelaskan pada pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 bahwa sekurang-kurangnya menjelaskan antara lain:

- a. Arah kebijakan umum pemerintahan daerah;
- b. Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;

- c. Penyelenggaraan urusan desentralisasi;
- d. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
- e. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Secara umum, LKPJ Bupati Malang Tahun 2022 sudah sesuai dengan sistematika yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Hanya saja ada beberapa catatan dan evaluasi yang perlu diperhatikan.

Dalam mencermati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2022, Panitia Khusus Bidang Hukum, Pemerintahan dan Perundang-Undangan, secara umum dapat disampaikan beberapa permasalahan, **catatan strategis dan rekomendasi**, sebagai berikut :

- 1.** Peranan Inspektorat Daerah sangat penting sebagai pemeriksa pertama, sebelum ada pemeriksaan dan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diharapkan Inspektorat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya melakukan pembinaan terhadap Perangkat Daerah dan kepala Desa dalam hal ini masih banyak Desa yang terjadi temuan terkait pengelolaan tanah kas Desa yang selama ini masih banyak permasalahan, dengan melakukan pemeriksaan reguler secara periodik. Adapun kendala di inspektorat yakni **masih kurangnya Anggaran, kurangnya tenaga pemeriksa dan sosialisasi** diharapkan Pemerintah Kabupaten Malang ada solusi dan inovasi sistem sehingga ke depan temuan pada Perangkat Daerah Kabupaten Malang dapat diminimalisir dan **memberikan dukungan (support) untuk 10 WTP berturut-turut;**

2. Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai aparaturnya pelaksana fungsi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, diharapkan ada **inovasi program kerja yang lebih baik** sehingga dalam penegakan hukum di Kabupaten Malang lebih maksimal, utamanya dalam penegakan Peraturan Daerah serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara maksimal;

✓ **Perlunya penambahan anggaran untuk kegiatan satpol PP dalam penegakan Perda bisa lebih efektif,**

✓ **Penambahan Armada Damkar untuk mendukung Malang barat, agar setiap penanganan bencana bisa maksimal dan efektif.**

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik. Permasalahan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun ke tahun sama, perlu ada **formula yang sistematis dan terukur, maksimalkan Tugas dan Fungsi Bank Jatim jika tidak bisa terpenuhi Kerjasama dengan Bank Lain** sehingga target, sasaran dan capaian kinerja bisa tercapai dengan maksimal;

4. Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah memberikan capaian kinerja yang



sudah baik dan Capaian dari sisi anggaran hampir sempurna, untuk rekomendasi yang perlu untuk di perbaiki yaitu:

- ✓ ***Mutasi Jabatan jangan terlalu cepat, sehingga terkesan di paksakan dan tidak profesional.***
- ✓ ***Dibutuhkan akselerasi SDM sehingga butuh anggaran untuk seleksi terbuka dan tugas Belajar.***

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dari hasil pengawasan dan monitoring DPRD ke Pemerintahan Desa di Wilayah Kabupaten Malang, ***Masih ada ditemukan permasalahan di Desa***, baik terkait Pelayanan Administrasi, Pengelolaan Keuangan DD/ADD/APBDes, Inventarisasi Tanah Aset Desa dan Kelurahan, hingga Penataan dan Pemberdayaan Kepala Desa beserta Perangkat Desa, agar pelaksanaan pemerintahan desa ke depan menjadi lebih baik, untuk itu DPRD menghimbau Pemerintah Kabupaten Malang lebih meningkatkan peran dalam pendampingan DPMD di Pemerintahan Desa, diharapkan agar tidak ada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terkena masalah hukum di kemudian hari.

Dibutuhkan kerja keras dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam melakukan pengembangan/Inovasi BUMDes. Pembentukan BUMDes bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Diharapkan ***BUMDes bisa menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa*** guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dari hasil pengawasan di beberapa desa di

Kabupaten Malang sudah ada BUMDes yang dikelola dengan baik bisa memberikan kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat desa setempat. Selanjutnya, DPRD menghimbau Pemerintah Kabupaten Malang agar ada inovasi, dukungan anggaran, percepatan dan kebijakan yang dapat mendorong agar BUMDes di desa-desa di Wilayah Kabupaten Malang bisa saling berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik;

untuk rekomendasi yaitu:

✓ ***Membangun infrastruktur jaringan komputer yang kredibel di seluruh desa dan OPD di Kabupaten Malang***

✓ ***Digitalisasi desa sehingga layanan di desa terpusat menjadi sentra layanan***

✓ ***Lakukan Survey Kepuasan Masyarakat tingkat Desa (SKM)***

6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan dasar administrasi kependudukan bagi masyarakat, dikarenakan Akte Kelahiran dan Kematian, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Pemetaan jumlah penduduk "**Data Bersih**" perlu terus ditingkatkan dan divalidasi, karena sebagai pangkalan data (Database) kependudukan harus terus update. DPRD Kabupaten Malang menghimbau agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terus melakukan inovasi dan terobosan dalam pelayanan publik, seperti Program ***Desaku Tuntas dan Identitas Penduduk Digital (IKD)*** diharapkan bisa segera berjalan di semua Desa di Kabupaten Malang sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi ; ***Perlu***

***adanya penguatan jaringan komputer di seluruh Kabupaten Malang untuk melayani masyarakat Kabupaten Malang. Masih diperlukan sosialisasi pelayanan adminduk di desa dan kecamatan.***

7. Dinas Pertanahan Kabupaten Malang untuk Permasalahan pertanahan di Kabupaten Malang perlu segera ada upaya penyelesaian oleh Pemerintah Kabupaten Malang secara prioritas, agar permasalahan tersebut tidak semakin berlarut-larut. ***Terkait rencana pembangunan Alun-alun Kepanjen hingga saat ini masih belum ada progres pembebasan tanah, DPRD menghimbau perlu ada kajian yang komprehensif agar segera ada solusi penyelesaian.*** Selanjutnya, DPRD juga mengharapkan terhadap aset tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Malang yang ada segera dilakukan ***inventarisasi secara valid*** dan yang belum bersertifikat segera dilakukan sertifikasi, agar tidak terjadi permasalahan atau sengketa hukum di kemudian hari;

#### 8. KPU DAN BAWASLU

Menjadi catatan kami terkait permintaan KPU untuk prioritas gudang logistik seluas 4000 m<sup>2</sup>

Bawaslu mengharapkan hibah gedung BKKBN sebagai sekretariat tetap Bawaslu dan perbaikan peraturan bupati terkait suport PNS yang memadai di Bawaslu.

9. Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang memiliki peran yang sangat penting dalam membuat peraturan Daerah dan peraturan Bupati sehingga perlu adanya Sosialisasi/Penyuluhan peraturan daerah melalui JDIIH untuk lebih digemakan karena masyarakat yang melanggar aturan banyak yang tidak mengetahui Perdanya.

10. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan catatannya untuk memaksimalkan publikasi
11. Bagian Tata Pemerintahan, Perlu adanya wadah komunikasi lintas vertikal dan LKPJ tidak perlu di cetak cukup softfile
12. Bagian Kerjasama, kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Malang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi (Kabupaten memberikan tanah untuk kedokteran Universitas Brawijaya) sehingga perlu diberikan beasiswa khusus bagi ASN dan Warga Kabupaten Malang.
13. Bagian Organisasi perlu adanya telaah anggaran dinas yang terlalu minim apakah dimerger atau ada penyikapan lain.

***Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Kami Hormati,***

Demikian Laporan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2022 Bidang Hukum, Pemerintahan dan Perundang-Undangan, disampaikan dengan harapan semoga ***catatan strategis dan rekomendasi*** sebagaimana disampaikan di atas, akan menjadi dokumen Pemerintah Kabupaten Malang yang tentu saja akan menjadi bagian dari sistem pengawasan dan evaluasi, yang akan menjadi bahan rujukan guna menetapkan kebijakan di masa yang akan datang bagi Bupati dan Wakil Bupati Malang dalam mewujudkan pemerintahan yang ***clean and good government to good public service***.

Sebelum mengakhiri laporan ini Kami menyampaikan **selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1444.H** bagi yang menjalankannya, semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini, dicatat sebagai amalan ibadah.

Mohon maaf, apabila dalam pembahasan dan penyampaian laporan ini terdapat sikap dan tindakan kami yang kurang berkenan.

**Sekian dan Terima kasih,**

**Ihdinash Shiratal Mustaqim**

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

KETUA PANSUS LKPJ  
BIDANG HUKUM, PEMERINTAHAN DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

Kepanjen, April 2023

JURU BICARA,

**AHMAD FAUZAN, S.Sos**

**WAHYU INDRAYANTI**

DEMIKIAN TADI TELAH KITA IKUTI BERSAMA LAPORAN PANITIA KHUSUS BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN. KEPADA SAUDARA **WAHYU INDRAYANTI** SEBAGAI JURU BICARA PANITIA KHUSUS DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.

YANG **KEDUA**, YAITU LAPORAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LKPJ BUPATI MALANG TAHUN 2022 **BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN** UNTUK MELAPORKAN HASILNYA. KEPADA JURU BICARA YANG TELAH DITUNJUK DIPERSILAHKAN.....

*.....Proses Penyampaian Laporan Pansus Bidang Ekonomi dan Keuangan.....*



***Assalamu,alaikum Wr.Wb.***

***Selamat Siang dan salam sejahtera.***

***Yang terhormat,***

***Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Malang;***

***Hadirin sekalian yang berbahagia,***

Mengawali Laporan Pansus ini, marilah senantiasa kita mengucapkan Puji syukur kehadirat Tuhan YME, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya semata, kita semua pada hari ini masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat hadir di forum yang terhormat ini, dalam rangka penyampaian Laporan Pansus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Malang Tahun 2022. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta Keluarga, Sahabat dan penerus perjuangannya.

***Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,***



Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa semua Kepala Daerah mempunyai kewajiban melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) sebagai media untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, efisien dan efektif. Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) pada dasarnya merupakan *progress report* atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang di tahun mendatang.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 yang berisi penjabaran hasil kinerja pembangunan yang harus disampaikan oleh Kepala Daerah. LKPJ tersebut telah disampaikan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang hari Jum'at, tanggal 17 April 2023. Dalam Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2022 ini sudah tergambar *progress report* tentang pencapaian kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, strategi dan arah kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2024.

#### ***Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,***

Memberikan Catatan Strategis terhadap LKPJ Bupati Malang Tahun 2022 di Bidang Ekonomi dan Keuangan hakekatnya merumuskan hasil monitoring dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD selama Tahun 2022. Secara substantif, penyampaian LKPJ Bupati Malang Tahun 2022 ini merupakan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 dengan tema Pembangunan yaitu : ***“Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan Sumber Daya Manusia dalam rangka Percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat”***. dengan prioritas pembangunan :

1. Penguatan Ketahanan ekonomi wilayah melalui Peningkatan Kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat berbaisi pada potensi unggulan daerah serta mendorong terciptannya wirausaha kreatif untuk memperdayakan masyarakat;
2. Pemerataan Pembangunan infrastruktur serta teknologi dan informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah menuju kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan antar wilayah;
3. Penguatan kualitas kompetensi dan daya saing sumber daya manusia berbagai bidang serta peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka mewujudkan iklim kehidupan dan demokratis dan agamis;
5. Penetapan tata kelola penetapan inovasi berkelanjutan di berbagai sektor guna memberi pelayanan publik yang prima;
6. Mewujudkan keselarasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas berkelanjutan hidup, resiko bencana, dan perubahan iklim.

Monitoring dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD ini tentu harus sesuai program dan tentunya dapat diukur bagaimana input, output, outcome, benefit dan impact dari program tersebut. Jika taat pada kerangka ini maka penilaian terhadap LKPJ Bupati menjadi sesuatu yang sistematis mengenai visi, misi dan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehubungan dengan hal itu, Panitia Khusus Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD telah melakukan kegiatan yang dapat membantu terwujudnya fungsi pengawasan dalam rangka membuat catatan strategis terhadap LKPJ Bupati Malang dengan telah melakukan Rapat Kerja, baik internal dengan anggota Pansus LKPJ Bupati Malang Tahun 2022 Bidang Ekonomi dan Keuangan maupun dengan Tim LKPJ Bupati Malang Tahun 2022 bersama Dinas Teknis terkait, serta melakukan kajian terhadap LKPJ Bupati Malang Tahun 2022.

### ***Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,***

Pada akhirnya, perkenankan Panitia Khusus LKPJ Bupati Malang Tahun 2022 Bidang Ekonomi dan Keuangan menyampaikan laporan ini dengan penuh keterbatasan, akan tetapi *Inshaallah* tidak mengurangi pikiran kritis dalam menilai kinerja Bupati Malang terutama di bidang pembangunan tahun 2022. Laporan hasil

pembahasan Pansus LKPJ Bupati Malang Tahun 2022 Malang Bidang Ekonomi dan Keuangan, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan strategis dalam bentuk pencapaian kinerja, kendala dan permasalahannya beserta rekomendasinya dalam LKPJ Bupati Malang tahun 2022 khususnya dalam bidang Ekonomi dan Keuangan.

1. Secara umum Penyampaian LKPJ Bupati tahun 2022 ini cukup lengkap, rinci dan sistematis. Dalam LKPJ Bupati Tahun 2022 sudah tergambar *progress report* tentang pencapaian kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, strategi dan arah kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

#### ***Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,***

Setelah melakukan serangkaian rapat kerja pansus dan pencermatan Secara khusus terdapat beberapa hal yang menjadi catatan strategis dalam bentuk pencapaian kinerja, permasalahan beserta rekomendasinya dalam LKPJ Bupati Malang Tahun 2022 khususnya dalam bidang Ekonomi dan keuangan yaitu :

#### **Bidang Pendapatan:**

- Secara Realisasi Pendapatan Kabupaten Malang juga sudah melebihi dari target yang telah ditentukan untuk target awal tahun anggaran 2022 yang tercantum dalam APBD sebesar Rp.4.256.368.816.888,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.4.019.891.694.509.65 atau mencapai sebesar 94,44%.
  - Namun, realisasi pendapatan yang bersumber dari 3 jenis yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain Pendapatan yang Sah. Ketiga jenis pendapatan tersebut yang perlu dilakukan evaluasi dan telaah kembali yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahwa di Kabupaten Malang pada tahun 2022 ditargetkan Rp.983.028.679.582,57 dan dapat direalisasikan sebesar Rp762.149.440.858,65 atau mencapai 77,53%.
- Terdapat 3 komponen PAD Kabupaten Malang:
- Pajak daerah yang melampaui target yakni Pajak Penerangan Jalan tercapai 116,17% dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tercapai

116,21% serta Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan Bank Jatim) tercapai 106,67%.

- Retribusi Daerah yang belum tercapai dengan presentase 29,36%
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal yang penerimaannya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan presentase 50,83% alangkah baiknya bagian realisasi pendapatan terisi.
- Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, belum tercapai (belum mencapai target) atau dengan presentase mencapai sebesar 75,55% (tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.399.310.204.482,00 terealisasikan Rp. 301.675.108.668,70
- Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk bentuk:
  - a. Sewa;
  - b. Pinjam Pakai ;
  - c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
  - d. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG);
  - e. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)
- Belanja operasi masih sangat tinggi 400% dibandingkan dengan belanja modal dan Sebaiknya belanja modal mendatang dapat ditingkatkan agar asset tetap yang dimiliki
- Perumda Jasa Yasa mempunyai 8 (delapan) Unit Usaha yang sebagian besar atau 75 % bergerak bergerak di Bidang Pariwisata.
- Perumda Jasa Yasa di tahun 2022 mencanangkan sebagai tahun pemulihan pasca pandemic dan menjadi tahun investasi, sehingga akan banyak upaya menarik investor ke Perumda Perumda Jasa Yasa untuk bekerja sama di dalam Revitalisasi infrastruktur lokasi wisata dan penambahan wahana .
- Sampai akhir akhir 2022 belum ada hasil bagian laba yang dibagikan ke pemerintah atas penyertaan penyertaan modal pada BUMD Jasa Yasa.

#### □ Koperasi dan UMKM

- IKU yang ditetapkan dapat dicapai semua dengan dengan capaian di atas 100%.
  - Sejumlah 21 program selama tahun 2022 dan semuanya mencapai target 100%
  - Permasalahan yang di hadapi Koperasi dan UMKM
  - Pengurus Koperasi kurang memiliki pengetahuan tentang perkoperasian.
  - Minim nya pengetahuan bisnis dan permodalan permodalan bagi UMKM.
  - Kurangnya promosi produk UMKM dan masih banyak menjual produk secara tradisional .
- Saran:
- Memberikan pelatihan tentang perkoperasian dan bisnis kepada pengurus koperasi.
  - Memberikan penyuluhan tentang pengetahuan bisnis bagi pelaku UMKM Selain itu membantu mencarikan permodalan murah atau kerjasama kerjasama dengan pemilik modal.
  - Memberikan sosialisasi tentang digitalisasi pemasaran pemasaran produk dan menyediakan wadah bagi UMKM untuk promosi melalui program pameran virtual
- Ketahanan Pangan dan Perkebunan
- Semua Program Target dan Realisasi 100% tetapi masih banyak masalah yang perlu dicari solusinya.
  - Ketahanan pangan Indikator kinerja utama tercukupi kebutuhan pangan utama (Beras) dan melebihi target
  - Dalam ketahanan pangan yang terdapat dalam definisi adalah ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas (stability) yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat.
  - Kondisi pangan kala pandemi covid 19 di nyatakan prima, karena alami surplus 13.39 %
  - Untuk ketersediaan pangan terutama dari tanaman padi mengalami surplus 84.149 ton

- Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 13.39 % dai bandingkan tahun sebelumnya.
  - Tanaman pangan dan Holtikultura
  - IKU dinas pertanian mencapai lebih dari 100 %,dengan indicator:
  - Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (100 %)
  - Persentase luas lahan padi sawah yang memiliki IP Padi sawah = 1.5(105 ,71 %)
- Badan Keuangan dan Asset Daerah
- Strategi yang dirumuskan sudah bagus dan dapat menyelesaikan sebagian permasalahan BMD yang dihadapi BKAD.
  - Aplikasi -E-BMD sebagai pengamanan Barang Milik Daerah, Hal ini dilakukan dengan cara pemberian stiker barcode seluruh Barang Milik Daerah Untuk sementara masih diterapkan pada internal BKAD
  - Dalam rangka meningkatkan kapabilitas Sumber Manusia BKAD melaksanakan dan mengirimkan ASN untuk Kegiatan Bimbingan Teknis
  - Melakukan inventarisasi dan validasi Data Barang Milik Daerah, Pemanfaatan dan Penghapusan serta serta penagamanan BMD dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah .
- Saran :
- Pemberian stiker pada BMD bersamaan dengan kegiatan inventarisasi, sehingga kepemilikan atas BMD sudah jelas
  - Peningkatan kapabilitas SDM (Bimtek) terkait BMD tidak hanya BKAD tetapi untuk semua pengurus BMD seluruh OPD, yang selama ini kurang mendapat perhatian .
- Badan Pendapatan Daerah
- Strategi yang dilakukan Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk melaksanakan melaksanakan

kebijakan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

□ Saran :

- Perlu menggali dan mengoptimalkan potensi sumber PAD karena realisasi PAD 2022 hanya 18,95 % dari total pendapatan
- Penerimaan pendapatan retribusi lebih lebih di tingkatkan karena realisasi pendapatan retribusi masih jauh dari dari target yaitu 29,36 %.
- Sosialisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan dan Bangunan (BPHTB)
- Salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan saat membeli rumah maupun properti lainnya. Subjek pajak yang wajib dikenakan BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
- Sesuai aturan, tarif pajak yang ditetapkan sebesar 5%.
- UU No .21 /1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah ubah dengan UU No .20 /2000, pemberian Hak Pengelolaan merupakan merupakan objek pajak
- Dikenakannya Hak Pengelolaan sebagai objek pajak adalah karena penerima Hak Pengelolaan memperoleh manfaat ekonomis dari tanah yang dikelolanya.

□ Perindustrian dan perdagangan

- Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan
- Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor
- Urusan Pemerintahan bidang Perindustria
- Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan
- Persentase industri kecil formal dan industri non formal yang mendapatkan fasilitas pengembangan usaha industri
- Beberapa masalah di dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Belum terpenuhinya standar produk industri untuk industri olahan makanan dan Minuman, berupa sertifikasi Halal dan Uji Mutu Produk

- Belum terbukanya pasar secara regional, nasional dan internasional untuk untuk produksi industri unggulan
- Saran
- Memfasilitasi produsen untuk pengurusan sertifikat halal dan uji halal dan uji mutu produk agar produk terjamin dan pelanggan yakin kehalalan produk yang dibeli
  - Perlu tindakan riil untuk mengenalkan produk lokal dengan mengikuti pameran tingkat local, regional, nasional dan internasional.
  - Menggali potensi PAD dari retribusi, mengoptimalkan dan menertibkan retribusi pelayanan pasar

**Kepanjen, 17 April 2023**

**Ketua Pansus LKPJ**  
**Bidang Keuangan dan Ekonomi**

**Juru Bicara**

**KUNCORO, SH**

**SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H.**



DEMIKIAN TADI TELAH KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN.

KEPADA SAUDARA SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H SEBAGAI JURU BICARA PANITIA KHUSUS DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.

ACARA YANG **KETIGA**, YAITU PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LKPJ BUPATI MALANG TAHUN 2022 **BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR**.

KEPADA JURU BICARA PANITIA KHUSUS YANG TELAH DITUNJUK DIPERSILAHKAN.....

*.....Proses Penyampaian Laporan Pansus Bidang Pembangunan dan Infrastruktur.....*



***Assalamu,alaikum Wr.Wb.***

***Selamat Siang dan salam sejahtera.***

***Yang terhormat,***

***Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Malang;***

***Hadirin sekalian yang berbahagia,***

Mengawali Laporan Pansus ini, marilah senantiasa kita mengucapkan Puji syukur kehadirat Tuhan YME, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya semata, kita semua pada hari ini masih diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri Rapat Paripurna hari dalam rangka penyampaian Laporan Pansus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Malang Tahun 2022, memasuki hari ke 26 puasa Ramadhon saya ucapakan Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, Solawat serta salam tetap turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta Keluarga, Sahabat dan penerus perjuangan beliau hingga akhir jaman.

***Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,***

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa semua Kepala Daerah mempunyai kewajiban melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) sebagai media

untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, efisien dan efektif. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) pada dasarnya merupakan *progress report* atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang di tahun mendatang.

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 yang berisi penjabaran hasil kinerja pembangunan yang harus disampaikan oleh Kepala Daerah. LKPJ tersebut telah disampaikan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tanggal 17 April 2023. Dalam Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2022 ini sudah tergambar *progress report* tentang pencapaian kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, strategi dan arah kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD Perubahan 2021-2026.

### ***Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,***

Catatan Strategis oleh DPRD terhadap LKPJ Bupati Malang Tahun 2021, Pansus Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, hakekatnya merumuskan hasil monitoring dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD selama Tahun 2022. Secara substantif, penyampaian LKPJ Bupati Malang Tahun 2022 ini merupakan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 dengan visi Pembangunan yaitu ***“Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat ”***.

Dengan prioritas pembangunan adalah:

1. Penguatan Ketahanan ekonomi wilayah melalui Peningkatan Kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat berbaisi pada potensi unggulan daerah serta mendorong terciptannya wirausaha kreatif untuk memperdayakan masyarakat;

2. Pemerataan Pembangunan infrastruktur serta teknologi dan informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah menuju kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan antar wilayah;
3. Penguatan kualitas kompetensi dan daya saing sumber daya manusia berbagai bidang serta peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka mewujudkan iklim kehidupan dan demokratis dan agamis;
5. Penetapan tata kelola penetapan inovasi berkelanjutan di berbagai sektor guna memberi pelayanan publik yang prima;
6. Mewujudkan keselarasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas berkelanjutan hidup, resiko bencana, dan perubahan iklim.

Monitoring dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD ini tentu harus sesuai program dan tentunya dapat diukur bagaimana input, output, outcome, benefit dan impact dari program tersebut. Jika taat pada kerangka ini maka penilaian terhadap LKPJ Bupati menjadi sesuatu yang sistematis mengenai visi, misi dan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehubungan dengan hal itu, Panitia Khusus Bidang Pembangunan dan Insfrastruktur DPRD telah melakukan kegiatan yang dapat membantu terwujudnya fungsi pengawasan dalam rangka membuat catatan strategis terhadap LKPJ Bupati Malang dengan telah melakukan Rapat Kerja, baik internal dengan anggota Pansus LKPJ Bupati Malang Tahun 2022 Bidang Pembangunan dan Insfrastruktur maupun dengan Tim LKPJ Bupati Malang Tahun 2022 bersama Dinas Teknis terkait, serta melakukan kajian terhadap LKPJ Bupati Malang Tahun 2022.

***Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,***

Pada akhirnya, perkenankan Panitia Khusus LKPJ Bupati Malang Tahun 2022 Bidang Pembangunan dan Insfrastruktur menyampaikan laporan ini dengan penuh keterbatasan, akan tetapi *Insyallah* tidak mengurangi pikiran kritis dalam menilai kinerja Bupati Malang terutama di Bidang Pembangunan dan Insfrastruktur tahun 2021. Laporan hasil pembahasan Pansus LKPJ Bupati Malang Tahun 2022

Malang Bidang Pembangunan dan Insfrastruktur, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan strategis dalam bentuk pencapaian kinerja, kendala dan permasalahannya beserta rekomendasinya dalam LKPJ Bupati Malang tahun 2022 khususnya dalam Bidang Pembangunan dan Insfrastruktur yaitu :

2. Secara umum Penyampaian LKPJ Bupati tahun 2022 ini cukup lengkap, rinci dan sistematis. Dalam LKPJ Bupati Tahun 2022 sudah tergambar *progress report* tentang pencapaian kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, strategi dan arah kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Kegiatan – kegiatan mana saja yang sudah sesuai dengan visi, misi, strategi dan arah kebijakan daerah dan dapat terpenuhi secara optimal dan kegiatan – kegiatan mana saja yang belum sesuai dan yang belum terpenuhi. Pemetaan keberhasilan, kekurangan, peluang dan kendala sangatlah penting guna menyusun strategi dan prioritas program kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

### ***Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,***

Setelah melakukan serangkaian rapat kerja pansus dan pencermatan secara khusus terdapat beberapa hal yang menjadi catatan strategis dalam bentuk pencapaian kinerja, beserta rekomendasinya dalam LKPJ Bupati Malang Tahun 2022 khususnya dalam Bidang Pembangunan dan Insfrastruktur yaitu :

## **A. BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR**

### **1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga**

Terkait serapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan target Anggaran sebesar Rp. **508.170.824.977,00** dan realisasi sebesar Rp. **482.933.254.054,44** dan serapan **95,03%** dengan sisa anggaran Rp. **25.237.570.951,56**. Serta **capaian Kinerja: Pembangunan** infrastruktur baik Rehabilitasi maupun pembangunan baru akan memberikan dampak perekonomian yang luas yang pada akhirnya akan meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Pencapaian kegiatan yang telah dilakukan yaitu: terkait prasarana jalan kondisi mantap dengan target 72,80% dan sudah terealisasi 72,85%, dan jalan kabupaten malang yang memenuhi persyaratan teknis jalan dengan target 29,33% serta realisasi 29,33% dengan jalan kabupaten sepanjang 1.668,72 km secara bertahap kondisinya terus ditingkatkan. jalan kabupaten kondisi Baik sepanjang 1.215,77 km; Jumlah Jembatan yang memenuhi standar dengan lebar 6 m, ditahun 2022 sebanyak 345 buah.

#### **Rekomendasi / Catatan Strategis;**

1. Mengharapkan agar Dinas PU Bina Marga mampu hadir memonitor, mendata serta menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait kondisi eksisting infrastruktur baik jalan, drainase, jembatan untuk mewujudkan kondisi infrastruktur Kabupaten Malang yang baik dan merata
2. Perlunya penjadwalan pentahapan yang baik dalam proses perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan yang lebih mendetail dan terstruktur untuk menunjang pemaksimalan serapan anggaran

#### **2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya**

Untuk serapan anggaran di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya

dengan target Anggaran **sebesar Rp. 134.393.650.872 dan realisasi sebesar Rp. 129.074.866.635 dan serapan 96,04% dengan sisa anggaran Rp. 5.318.784.237.**Capaian Kinerja bidang Perumahan mencakup RTLH yang telah ditingkatkan menjadi layak huni sebesar 8.719 unit dari total 13.368 unit dengan prosentase 65,22%. Penduduk yang mendapatkan akses air minum pada tahun 2022 sebesar 2.164.365 jiwa dengan prosentase 81,65%.

#### **Rekomendasi / Catatan Strategis;**

1. Perlu adanya perencanaan baik dalam hal waktu, biaya maupun kualitas yang lebih mendetail untuk menunjang pemaksimalan serapan anggaran
2. Menjaga agar penunjukan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan dilakukan dengan baik serta menunjuk konsultan yang berkualitas/kredibel agar dapat merencanakan dan mengawasi pembangunan dengan selalu terjaga baik dalam segi waktu maupun kualitasnya.
3. Berdasarkan hasil pengawasan terkait pola pembangunan tenokratik perlu adanya sebuah kajian untuk menentukan apakah pola pembangunan multiyears ditetapkan dan ditargetkan selesai berapa tahun

### **3. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air**

Terkait **serapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dengan target Anggaran sebesar Rp. 73.240.840.401 dan realisasi sebesar Rp. 67.267.992.262 dan serapan 91,84% dengan sisa anggaran Rp. 5.972.848.139.** Di bidang irigasi, peningkatan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik tahun 2022 sepanjang 798.291,86 m. Dengan rincian saluran panjang saluran primer 1.220.942,24m dan saluran primer 176.620,25m dengan Kecukupan debit air irigasi terhadap luas areal pertanian sebesar 35.298 liter/detik, sehingga dengan adanya data tersebut diminta untuk ditingkatkan kembali terkait jaringan irigasi untuk are pertanian dikarenakan banyak keluhan kekurangan air untuk pertanian.

#### **Rekomendasi / Catatan Strategis;**

1. Terkait saluran irigasi kondisi baik selalu meningkat tiap tahun, namun di tahun 2022 menurun drastis disebabkan oleh bertambahnya saluran irigasi primer, oleh karena itu dimohon dinas terkait untuk mendata ulang terkait jaringan yang ada.

2. Terkait debit air irigasi pada area pertanian juga menurun drastis dibandingkan tahun 2021 dan tahun 2022, dimohon dinas untuk turun ke lapangan serta memonitoring terkait kendala tersebut
3. Perlunya peningkatan dan menjaga intensitas koordinasi dengan Dinas Provinsi terkait untuk memelihara kelangsungan kefungsi aset-aset yang terkoordinasi dengan pemerintah propinsi Jawa timur

#### **4. Badan Perencanaan Pembangunan**

Untuk Pencapaian Kinerja : Secara umum kegiatan perencanaan pembangunan cukup baik dan optimal, dibuktikan dengan Prosentase Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mencapai 100%;

#### **Rekomendasi / Catatan Strategis;**

1. Bappeda agar selalu hadir dan mengawal tercapainya IKU maupun IKD yang merupakan indikator keberhasilan daerah yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD
2. Perlunya Bappeda menyoroti terkait berbagai data yang tersaji dalam capaian kinerja yang tertuang dalam IKU dan IKD dengan faktual kondisi di masyarakat. Capaian IKU dan IKD yang tinggi diharapkan sejalan dan dapat dirasakan dalam realitas di masyarakat.
3. Untuk lebih dioptimalikan koordinasi dan pendekatan persuasif dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Malang agar merealisasikan CSR melalui kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang;
4. Perlunya menghadirkan sinergitas seluruh shareholder pemerintahan daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan perencanaan daerah yang partisipatif & komprehensif.

#### **5. Dinas Perhubungan**



**Terkait serapan anggaran di Dinas Perhubungan dengan target Anggaran sebesar Rp. 31.093.997.816 dan realisasi sebesar Rp. 28.454.926.686 dan serapan 91,51% dengan sisa anggaran Rp. 2.639.071.130.** Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Bidang Perhubungan, yaitu tercapainya beberapa program IKU yaitu program kendaraan bermotor laik jalan yang sudah terealisasi 85%, dan program kuantitas prasarana lalu lintas dan angkutan jalan 20%

#### **Rekomendasi / Catatan Strategis;**

1. Untuk program kuantitas prasarana lalu lintas dan angkutan jalan apa kendala yang dihadapi karena capaian yang sangat minim sekali, diharapkan untuk dinas perhubungan di dalam program ini lebih efisiensi lagi dalam perencanaan dan pelaksanaan program tersebut
2. Untuk lebih memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan jalan, agar merata pada semua kecamatan dan desa di Wilayah Kabupaten Malang khususnya yang menuju tempat-tempat pariwisata dan pendidikan untuk mengurangi angka kecelakaan;
3. Perlunya optimalisasi serta peningkatan terkait Pengelolaan Parkir di wilayah Kabupaten Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
4. Perlunya Dinas Perhubungan untuk memahami serta mengadakan berbagai kegiatan yang diperlukan baik berupa kajian/penelitian maupun kegiatan lain untuk mendata, memetakan dan menghadirkan solusi terkait berbagai permasalahan kemacetan di Kabupaten Malang.

#### **6. Dinas Lingkungan Hidup**

**Terkait serapan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup dengan target Anggaran sebesar Rp. 40.854.314.613 dan realisasi sebesar Rp. 39.046.369.575 dan serapan 95,57%**

**dengan sisa anggaran Rp. 1.807.945.038.** Pencapaian Kinerja : Secara umum kinerjanya sudah cukup baik dan optimal dibuktikan dengan semakin meningkatnya layanan penanganan dan pengurangan sampah serta

capaian terhadap pengawasan kegiatan / usaha atas izin lingkungan dan semakin bertambah luasnya ruang terbuka hijau (RTH), dan capaian Indeks Kualitas Air tercapai 66,39%, untuk Indeks Kualitas Udara Tercapai 79,24%, dan Indeks Kualitas lahan 46,68%, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 67,52%

### **Rekomendasi / Catatan Strategis;**

1. Perlu adanya upaya terkait peningkatan daya tampung TPS/TPST/TPA untuk menampung tonase sampah dari masyarakat setiap harinya. Mengingat bahwa kapasitas daya tampung sampah belum memenuhi tonase sampah yg dihasilkan masyarakat.
2. Pemerintah daerah harus lebih serius mewujudkan 3 strategi khususnya dilingkungan hidup terbukti permasalahan limbah B3 yang dihasilkan di puskesmas, poliklinik, rumah sakit dan Industri belum tertangani (masih dikelola di luar daerah/kerjasama), jika ini ditangani dengan serius tidak saja menyelesaikan problematik lingkungan, juga meningkatkan PAD yang tentunya berimbas pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Lebih ditingkatkan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan dan kebersihan lingkungan kepada masyarakat dalam perubahan perilaku yang bersifat *pro-environment* ;
4. Pengoptimalan pemantauan secara berkala mengenai kualitas udara dan air, konservasi pada daerah sumber air dan lahan kritis serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

### **7. Dinas Komunikasi dan Informatika**

Pelaksanaan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang di tahun 2022 sudah cukup baik di lihat dari serapan anggarannya sebesar 95.92% serta dibutuhkannya kinerja Kominfo untuk beberapa wilayah blank spot yang ada di wilayah Kabupaten Malang, agar masyarakat Kabupaten Malang secara keseluruhan bisa merasakan jaringan internet.

### **Rekomendasi / Catatan Strategis;**

1. Perlu adanya perhatian terkait wilayah Blank spot di wilayah Kabupaten Malang; (baik internet maupun sinyal ponsel) untuk mewujudkan fasilitas informasi & komunikasi yang merata di Kabupaten Malang.
2. Belum Tercapainya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Malang secara menyeluruh, untuk mendorong setiap informasi di tingkat Kabupaten tersampaikan ke seluruh wilayah Kabupaten Malang.
3. Perlu upaya sosialisasi maupun kegiatan terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinternet/bermedia sosial agar menciptakan lingkungan dunia maya yang sehat dan tidak melanggar poin-poin yang tercantum dalam UU ITE di Kabupaten Malang.
4. Perlunya peningkatan terkait sistem kerja berbasis elektronik di wilayah Pemerintahan Kabupaten Malang.

### **8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Kabupaten Malang mencapai 96,31 % dan ini merupakan serapan tertinggi sehingga perlu ditingkatkan lagi untuk serapan serta capaian kinerja yang ada di Balitbangda.

### **Rekomendasi / Catatan Strategis;**

1. Mendorong setiap upaya Balitbangda untuk mengadakan berbagai kegiatan baik berupa penelitian, kajian, sosialisasi, FGD, diseminasi, seminar untuk menyampaikan pemikiran/riset serta menampung berbagai masukan dari masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Malang yang partisipatif dan berkemajuan.
2. Perlu adanya berbagai kajian penting untuk menunjang kemajuan Kabupaten Malang. Termasuk didalamnya kajian terkait potensi pendapatan daerah, inovasi yang diperlukan daerah, hingga hal-hal teknis mencakup data kemacetan, sebagainupaya mewujudkan Kabupaten Malang yang maju dan makmur.

## **9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Pencapaian Kinerja : Secara umum kinerjanya sudah cukup baik dan optimal dibuktikan dalam pembentukan terkait Desa Tangguh Bencana, serta Penangan pasca bencana dengan cepat dan sigap bencana, dengan melakukan assement, memberikan rambu bahaya sementara, memberikan bantuan sembako, melakukan kerja bakti, memberikan bantuan stimulus, membuat pos pantau serta koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur dan presentase desa tangguh bencana 100%

### **Rekomendasi / Catatan Strategis;**

1. Meningkatkan berbagai upaya untuk mewujudkan Desa Tangguh Bencana di kabupaten Malang baik melalui kegiatan pelatihan/workshop maupun kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan
2. Perlunya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan Resiko Bencana ;
3. Perlunya menghadirkan data yang lengkap dan komprehensif terkait wilayah mitigasi daerah rawan bencana.
4. Mendorong terselesaikannya bantuan dari pemerintah pusat terkait dana bantuan kerusakan rumah yang terjadi akibat adanya gempa di Malang selatan.

Selain catatan strategis dan rekomendasi di atas, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih :

1. Perlunya memverifikasi setiap data yang dipaparkan pada capaian IKU maupun IKD. Hal ini untuk mensinkronkan kondisi antara data paparan dengan realita di lapangan, harapannya setiap data yang disampaikan pada pembahsan bersumber dari data yang valid dan dari Lembaga yang kredible.
2. Perlu adanya Koreksi dan evaluasi Tim LKPJ lebih teliti karena ada ketidaksesuaian data yang disampaikan Bupati dalam naskah pidato Bupati dengan dokumen LKPJ yang diserahkan kepada DPRD, mengingat dokumen LKPJ sangat penting dan tersampaikan pada publik. Salah satu contoh dokumen yang disampaikan saat rapat kerja dengan dokumen di LKPJ tidak sesuai.

3. Pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya mampu memberikan dampak pada peningkatan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, meningkatnya pendapatan perkapita dan mampu menekan gini ratio (tingkat kesenjangan pendapatan) serta dapat meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia.
4. Diperlukan adanya Kajian Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Malang dengan tujuan mengukur sejauh mana dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten Malang dengan output berupa Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Malang.
5. Mengingat beberapa OPD tidak punya wewenang melakukan Kajian terhadap program kegiatan yang prioritas, maka setiap OPD harus melakukan kajian program prioritas tersebut ke OPD terkait agar hasil efektif, efisien dan terukur;

***Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,***

Demikian Laporan Pansus LKPJ Bupati Malang Tahun 2022 Bidang Pembangunan dan Infrastruktur ini disampaikan dengan harapan semoga catatan strategis sebagaimana disampaikan di atas, dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan proses pembangunan di Kabupaten Malang pada saat ini dan untuk tahun yang akan datang, sehingga benar-benar dapat menyentuh kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang. Hal ini dimaksudkan agar dapat dilakukan evaluasi yang bersifat menyeluruh atas capaian RPJMD Tahun 2021-2026. Terima kasih.

**Wallohulmu'afik illa aqwamithorik,**

**Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,**

**PANSUS LKPJ BUPATI MALANG TAHUN 2022**

**BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR**

**KETUA**

**JURU BICARA**

**Dra. Hj. Tutik Yunarni**

**MAHRUS ALI**

DEMIKIAN TADI TELAH KITA IKUTI PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR.

KEPADA SDR. MAHRUS ALI SEBAGAI JURU BICARA PANITIA KHUSUS DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.

BERIKUTNYA PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LKPJ BUPATI MALANG TAHUN 2022 **BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**. KEPADA JURU BICARA YANG TELAH DITUNJUK UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORANNYA.

*.....Proses Penyampaian Laporan Pansus Bidang Kesejahteraan Rakyat.....*



***Assalamu'alaikum. Wr. Wb.***

***Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita sekalian***

Yang Terhormat,

- Saudara Ketua DPRD Kabupaten Malang;
- Saudara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang ;
- Para Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Malang;
- Saudara Anggota DPRD Kabupaten Malang;
- Saudara Sekretaris dan para Kabag berserta staf Sekretariat DPRD Kabupaten Malang yang berbahagia.

Mengawali acara Rapat Paripurna Intern Dewan hari ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan rasa puji syukur hadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, kita pada hari ini bertepatan dengan Bulan Suci Romadhon kami sampaikan selamat Menjalankan Ibadah Puasa, sehingga dapat bersama – sama melaksanakan paripurna Internal, Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, para kerabat, sahabat serta para pengikutnya dan kita harapkan syafaatnya.

Seiring dengan ungkapan rasa syukur tadi, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Panitia Khusus Bidang Kesejahteraan Rakyat, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan rapat kerja Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2022.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 24 Maret 2023 telah disampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2022, oleh Saudara Wakil Bupati Malang. Serta ditindaklanjuti dengan Pembentukan Pansus DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2022. Pada tanggal 29 Maret 2023 telah dilakukan pula Kajian Pansus. Serta dilanjutkan Pembahasan Rapat Kerja Pansus Bidang Kesejahteraan Rakyat tanggal 30 Maret sampai dengan 12 April 2023 dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

***Saudara Pimpinan dan hadirin sekalian yang berbahagia.***

Penyampaian LKPJ Tahun 2022, dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai perundang-undangan, yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Malang adalah, "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika". dengan Misi: 1) Mewujudkan Kesejahteraan



Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul; 2) Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila; 3) Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa, 4) Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera; 5) Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan. Hal-hal pokok dan penting yang terkandung dalam visi dan menjadi pijakan pelaksanaan 4 pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 melalui MALANG MAKMUR (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada dasarnya merupakan *progress report* atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan acuan tindakan perbaikan dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Malang di tahun mendatang.

***Saudara Pimpinan dan hadirin sekalian yang berbahagia.***

Otonomi daerah yang dijadikan platform kebijakan adalah dimaksudkan untuk memastikan bahwa kesejahteraan rakyat benar-benar mampu dijadikan perhatian utama pemerintah daerah. Tujuan otonomi daerah yang menekankan pada peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk meningkatkan daya saing dengan mengoptimalkan keanekaragaman potensi di setiap daerah.

Untuk memastikan kesejahteraan tersebut, Kabupaten Malang telah memulai langkah yang tepat dengan menyusun prioritas strategi umum kebijakan yang merupakan landasan pembangunan pemerintah Kabupaten Malang. Berbagai pandangan di atas diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan inspirasi dalam menetapkan program kegiatan ke depan oleh seluruh pemangku kebijakan.

***Saudara Pimpinan dan hadirin sekalian yang berbahagia.***

Penyampaian LKPJ Bupati Malang Tahun 2022 dengan tema Pembangunan "Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan Sumber Daya Manusia dalam rangka percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat' Berkaitan dengan hal tersebut, Panitia Khusus memberikan Catatan Strategis dan Rekomendasi untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :

#### **A. Bidang Pendidikan**

1. Perlu berkoordinasi dengan BKPSDM dan PGRI guna mengatasi kekurangan guru
2. Penambahan pengalokasian BOSKAB SD/SMP Negeri- swasta dalam pemenuhan Standart Pelayanan Minimal.
3. Pemberian Bantuan Berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan guna peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
4. Peningkatan Kualitas akademik dan kompetensi Pendidik serta tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dengan melalui pemetaan tenaga pendidik (bezeting).
5. Perlu di adakan penambahan SMP Negeri di Wilayah Kecamatan Pakis bagian barat diantaranya Desa Mangliawan, Tirtomoyo, Saptorenggo, Ampeldento, Asrikaton dan Sekarpuro, karena semua wali murid kesulitan dalam mencari akses pendidikan yang disebabkan adanya Zonasi.
6. Masih adanya kepala sekolah yang merangkap lebih dari satu sekolah

#### **Rekomendasi**

- Banyak terdapat kekurangan tenaga pendidik ASN pada Satuan Pendidikan Dasar (SD, SMP) Negeri untuk sementara ini diatasi dengan pengajuan tenaga ASN kepada Pemerintah Pusat melalui pengadaan PNS dan P3K dan upaya peningkatan kesejahteraan secara bertahap , selain itu Pemerintah Daerah harus selalu berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal pengangkatan PNS dan P3K tersebut lebih memprioritaskan tenaga honorer yang sudah ada , dari pada menambah tenaga baru dari masyarakat umum.

- Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
- Meningkatkan kualitas tenaga pendidik,serta pemerataan bezeting
- Pemenuhan SPM bisa melalui BOSKAB untuk satuan pendidikan SD-SMP Negeri maupun swasta, anggaran tersebut diharapkan mendapat perhatian dalam APBD Kabupaten Malang pada tahun yang akan datang.

## **B. Bidang Kesehatan**

Kurang optimalnya Standar Pelayanan yang operasioanal untuk memudahkan tercapainya target pelayanan pada semua penduduk yang berhak atas pelayanan SPM;

1. Masih adanya kader yang kurang memahami tentang kesehatan ibu dan anak;
2. Jumlah Sumberdaya Kesehatan masih kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk;
3. Beberapa lahan Puskesmas tidak dapat di lakukan pengembangan sehingga perlu adanya relokasi
4. Masih kurangnya fasiitas kesehatan (RS);
5. Masih adanya AKI,AKB;
6. Masih ada Stunting
7. Tingkat hunian tercapai 52,95% belum mencapai target hunian sebesar 60-80% sesuai standart Kemenkes karena adanya kebijakan dari BPJS tentang rujukan berjenjang dan belum sepenuhnya masyarakat memanfaatkan Rumah Sakit Pemerintah sebagai fasilitas pelayanan kesehatan umum.

## **Rekomendasi**

- Penyediaan kapabilitas pelayanan dengan prioritas pertumbuhan dan pembelajaran fasilitas pelayanan kesehatan yang handal.
- Meningkatkan proses dan sistem layanan yang berkualitas sesuai kebutuhan pelanggan.
- Membangun loyalitas pelanggan dengan memberikan pelayanan yang Prima dan terjangkau

- Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah yang berkualitas memenuhi standar dan terakreditasi
- Menambah akses fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit Umum Daerah)
- Menambah akses fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Tingkat Pertama (Puskesmas)
- Penyediaan standar jumlah dan mutu Alat dan bahan untuk layanan SPM
- Penyediaan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang sesuai standar
- Peningkatan metode layanan yang inovatif dan proses layanan yang handal/prima
- Menyusun perencanaan konvergensi lintas pemangku kepentingan dalam upaya penurunan AKI dan AKB
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penurunan AKI dan AKB
- Menerapkan strategi inovasi layanan yang kreatif untuk menurunkan AKI dan AKB
- Meningkatkan upaya penekanan angka stunting dan gizi buruk dimana sesuai target Pemkab Kab. Malang di tahun 2024 dengan nol stunting
- Peningkatan kualitas dan kuantitas manajemen penyelenggaraan operasional di Rumah Sakit yang profesional sesuai kebutuhan standart kompetensi jabatan dan standart pelayanan publik
- Perencanaan, penyiapan dan pengembangan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana untuk memenuhi standart minimal penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional.
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan perorangan tingkat rujukan secara komperhensif, meningkatkan jejaring dengan puskesmas, bekerjasama dengan dengan asuransi non BPJS promosi digitalisasi pada masyarakat dengan memaksimalkan media sosial.

### **C. Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak**

- Partisipasi perempuan dibidang ekomi kreatif masih rendah;

- Permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak masih kurang maksimal, hal ini dapat dilihat dari tingkat laporan kekerasan pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan
- Pembangunan Gender saat ini masih pada level perangkat daerah dan belum terintegrasi sampai pada level pemerintah Desa/Kelurahan

### **Rekomendasi**

- Meningkatkan penguatan kelembagaan, koordinasi, sosialisasi terkait peningkatan keadilan gender, termasuk ketersediaan data anggaran responsif gender.
- Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan hukum.
- Meningkatkan Penguatan kelembagaan, koordinasi, sosialisasi, terkait pemenuhan hak anak, termasuk pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- Meningkatkan penguatan kelembagaan, koordinasi, sosialisasi dan jaringan penanganan kekerasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

### **D. Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**

1. Perlu strategi pemberdayaan generasi muda yang diarahkan pada pengelolaan pembangunan dilakukan SDM yang berkualitas, kompeten dan profesional, peduli dan tanggap pada tuntutan aspirasi dan kepentingan generasi muda serta dilakukan secara Bersama-sama dalam sinergi yang kompak dan harmonis oleh seluruh atau pihak terkait
2. Strategi pemberdayaan generasi muda dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan kemandirian dan profesionalisme, sehingga dapat men-dorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional serta meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menciptakan iklim yang kondusif pada setiap kegiatan generasi muda
3. Strategi Pemberdayaan Olahraga yang diarahkan untuk mendorong perkembangan olahraga yang berkualitas dan dengan prestasi yang mampu

menjadi kebanggaan daerah dan masyarakat Jawa Timur, serta olahraga yang semakin digemari oleh masyarakat melalui kegiatan pembudayaan olahraga. Dari sudut pandang masyarakat, strategi pemberdayaan olahraga diarahkan untuk membangun masyarakat yang memiliki ketahanan fisik dan mental yang sehat dan bugar, serta berbagai perilaku yang positif. Pemberdayaan olahraga juga dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan olahraga sebagai profesi yang mampu mengangkat insan-insan olahraga untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang selayaknya

### **Rekomendasi**

- Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada.
- Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya pemuda serta masih minimnya pembekalan untuk peserta yang lolos pada kegiatan dimaksud.
- Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat.
- Rendahnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat sekolah
- Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan.
- Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat.
- Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia.
- Beberapa tantangan yang harus dihadapi karena Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar berkorelasi pada tingginya jumlah pemuda dan jangkauan pembinaan serta ketersediaan SDM Aparatur yang berkualitas
- Belum ada sistem informasi yang memadai di bidang kepemudaan dan keolahragaan

### **E. Bidang Tenaga Kerja**

1. Perlu adanya penyempurnaan indikator kinerja secara lebih rinci (contoh yang

yang maksud dengan meningkatnya perluasan kerja 20% (RPJMD) perlu dirumuskan dalam berbagai indikator yang bisa diukur )

2. Perlu di buat beberapa program dan kegiatan yang lebih inovatif untuk memperluas lapangan kerja
3. Adanya wabah pandemi covid-19 yang berakibat pada *refocusing* anggaran sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja yang sudah ditetapkan.
4. Capaian program penurunan angka pengangguran diperlukan dukungan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia yang mampu berdaya saing
5. Persentase penyerapan tenaga kerja terealisasi 32,34% di tahun 2021 sebesar 4.1% tercapai 5.4% (Capaian 57.41% dengan katogeri “memenuhi”). Pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja sebanyak 1.843 orang
6. Dinas Tenaga Kerja diharapkan dalam meningkatkan kapasitas dan pelayanan informasi kerja melalui fasilitasi website secara online, kegiatan Job Market Fair dan Sosialisasi Mekanisme Pelayanan Bursa Kerja AKAD yang dilaksanakan oleh Seksi Informasi Pasar Kerja
7. Diharapkan kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mempermudah para lulusan SMK di Kabupaten Malang dalam mencari tempat magang guna meningkatkan skill sebelum benar-benar terjun dalam dunia kerja kemudian harus adanya perluasan informasi lowongan kerja kepada masyarakat melalui sosial media yang dapat dijangkau lebih banyak para pencari kerja
8. Perlu adanya pendataan kelulusan SMU, SMK,STM yang ada di Kabupaten Malang sejauhmana kopetensi yang dibutuhkan oleh penerima kerja/
9. Diharapkan bisa memberikan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah Kabupaten Malang agar masyarakat dapat menciptakan usaha kecil mandiri, kemudian secara intensif mengupayakan koordinasi dengan instansi terkait agar dapat menekan angka pengangguran serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal ketrampilan sesuai ketersediaan lapangan kerja dan peluang usaha.

10. Perlu adanya keselarasan dalam penghitungan rumus pelatihan yang ada agar peserta yang dilatih sesuai dengan yang diharapkan masyarakat yang ada di Kabupaten Malang dalam memberikan bantuan pelatihan
11. Untuk transmigrasi diharapkan adanya kegiatan penyuluhan dan pelatihan transmigran dengan output data calon transmigran yang akan diberangkatkan ditahun yang akan datang sehingga bila ada kuota dari kementerian dan provinsi, Dinas Tenaga Kerja sudah siap memberangkatkan calon transmigran

### **Rekomendasi**

1. Perlu adanya penyempurnaan indikator kinerja secara lebih rinci untuk mengetahui jumlah pengangguran, yang sudah mengikuti pelatihan serta yang sudah bekerja atau yang sudah usaha sehingga nanti bisa dirumuskan dalam berbagai indikator yang bisa diukur.
2. Peningkatan penciptaan lapangan kerja di desa melalui program digitalisasi desa, baik terkait dengan BUMDES, Poktan, Gapoktan, seni dan budaya, wisata pertanian, dan lain-lain.

### **F. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan**

- Kurangnya pendidikan dan pelatihan teknis kepariwisataan;
- Sarana dan prasarana penunjang kerja yang kurang memadai
- Kurang sinerginya kegiatan antar bidang dalam pelaksanaan program Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
- Data seni budaya dan kepariwisataan yang belum terhimpun secara baik
- Sistem pengendalian dan evaluasi terhadap program kerja belum dilaksanakan secara optimal

### **Rekomendasi**

- Optimalisasi pada kualitas, kuantitas dan teknik promosi
- Optimalisasi hasil identifikasi pasar wisatawan
- Optimalisasi jejaring kepariwisataan dalam pengembangan kepariwisataan
- Optimalisasi peran serta masyarakat dalam meningkatkan performa destinasi wisata



- Optimalisasi perbaikan sarana prasarana dan aksesibilitas penunjang kepariwisataan
- Optimalisasi peran serta seniman dan budayawan dalam pemajuan seni budaya daerah
- Optimalisasi pembinaan dan pengembangan seni budaya
- Optimalisasi perlindungan pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya, situs dan permuseuman daerah

## **G. Bidang Sosial**

1. Diperlukan perencanaan yang komperhensip terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola perencanaan berbasis perencanaan masyarakat, dengan lebih melibatkan lebih banyak peran dari pada stacholeders secara tranparan, demokratid dan akuntabel.
2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi penanganan anak jalanan, tuna wisma, pengemis,tuna susila, dan psikotik atau gangguan jiwa dimana saat ini jauh lebih besar jumlah sebarannya, dibandingkan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang dilakukan
3. Diperlukan langkah-langkah dalam menurunkan angka kemiskinan karena angka kemiskinan masih tinggi dan disebabkan banyak pengangguran.

## **Rekomendasi**

1. Perlu adanya konsistensi penggunaan indikator kinerja (input-proses-output-outcome)
2. Belum optimalnya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan masih lemahnya koordinasi serta meningkatnya peran individu keluarga, komunitas dan fungsi kelembagaan social kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan social kepada PMKS.
3. Perlu adanya penguatan database terhadap penerima bantuan karena masih di temukan data ganda bantuan masih tidak sesuai sasaran.

## H. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Presentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja prangkat daerah dalam satu tahun capaiannya sebanyak 93,86%
2. Angka kelahiran menurut umur /Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-49 tahun mencapai 101.57%
3. Program pembinaan keluarga berencana Persentase Contraceptive Prevalence 87.05%

### Permasalahan yang dihadapi

- Ada 2 kecamatan yang belum memiliki kantor KB yaitu Kecamatan Pakis dan Kromengan
- Belum tersedianya Gudang Alokon
- Kurangnya tenaga penyuluh KB dilapangan karena banyak yang purna tugas dan tidak ada penambahan sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam penggerakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB)
- Rendahnya SDM lini lapangan, sub PPKBD, Toga/Toma
- Masih rendahnya dukungan anggaran yang bersumber dari APBD karena sebagian anggaran bersumber dari APBN/DAK

### Rekomendasi

1. Melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan dan mitra kerja guna mendukung program Bangga Kencana
2. Memperkuat sumberdaya manusia yang ada dilapangan dalam hal ini PPKBD dan sub PPKBD melalui kegiatan Capacity Building
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi program bangga kencana di masyarakat pada kelompok kegiatan
4. Melakukan Inovasi-inovasi guna mempercepat pencapaian program
5. Penyusunan ulang program Keluarga Berencana, untuk meningkatkan angka keikutsertakan KB aktif, sehingga pertumbuhan angka kelahiran bisa dikendalikan

## **I. Bidang Perikanan**

- a. Kenaikan harga pakan ikan mengakibatkan biaya usaha budidaya ikan semakin tinggi dan margin keuntungan usaha semakin kecil sehingga akan mengurangi minat masyarakat akan berbudi daya ikan
- b. Peningkatan produktifitas dan daya saing rendah karena masih rendah dan budi daya kurang maksimal dikarenakan kurang optimalnya integritas system produksi dari hulu sampai hilir serta terbatasnya sarana dan prsarana yang memadai
- c. Perlunya Penguatan kapasitas tenaga tehnis di UPTD maupun tenaga tehnis lapangan sehingga tida sebanding dengan jumlah kecamatan dan luasan wilayah
- d. Perlunya penguatan kapasitas kelompok

### **Rekomendasi**

- Perlu pengembangan pakan ikan natif dengan sumber bahan pakan local.
- Dengan melakukan koordinasi ke BKPSDM terkait kebutuhan tenaga tehnis di UPTD agar diusulkan melalui rekrutmen CPNS dan PPPK
- Perlu melakukan koordinasi ke BPP (Balai Pelatihan dan Penyuluh) Banyuwangi terkait terkait kebutuhan penyuluh perikanan di Wilayah Kabupaten Malang
- Perlu penguatan kapasitas kelompok perikanan baik kelompok Pembudidaya (PODAKAN) Kelompok Nelayan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Kelompok Pengelola dan Pemasar (POKLASAR) dengan melaksanakan,
  1. Bimbingan tehnis perikanan tangkap dan pembudidaya
  2. Penguatan kelembagaan kelompok
  3. Fasilitas penyediaan sarana dan prasarana
  4. Fasilitas akses permodalan

## **J. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan**

- Di harapkan pada masa yang akan datang perpustakaan makin banyak jumlahnya makin merata keberadaannya, makin luas aksesnya terutama di wilayah malang selatan karena kesulitan dalam pememnuhan internet.
- Perpustakaan merupakan suatu ukuran kemampuan suatu komunitas masyarakat. Jika masyarakat sudah terbiasa menggunakan perpustakaan, dapat dipastikan peradabaan akan semakin berkembang, karena kecerdasan dan wawasan yang dimiliki masyarakat semakin tinggi
- Dibutuhkan sarana parsarana yang cukup mulai dari bangunan, koleksi buku sebagai bahan refrensi bacaan, kendaraan oprasional baik roda dua maupun roda empat telah tersedia dan jumlah anggaran yang mempuni kalu dilihat dari alokasi anggaran keseluruhan dari tahun ke tahun
- Ketersediaan kendaraan yang minim guna perpustakaan Keliling hal ini menjadikan kendala dinas dalam memberikan edukasi kempada terutama di daerah malang selatan karena kondisi geografis yang belum dapat masuk teknologi internet.

### **Rekomendasi**

- Perlu adanya perhatian penuh dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terhadap kelemahan masyarakat dalam menumbuhkan budaya literasi.
- Perlu adanya kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tebo dengan masyarakat atau perangkat desa yang dapat memberikan pengaruh positif kepada masyarakat untuk menumbuhkan budaya literasi masyarakat Kabupaten Malang
- Perlunya diadakan kegiatan-kegiatan lain yang edukatif dengan tema literasi dan bervariasi agar lebih menarik dimata masyarakat sambi mensosialisasikan budaya literasi

### **K Bidang Peternakan**

1. Meningkatnya produksi hasil ternak dengan capaian tahun 2022 sebagai berikut : 1. Persentase peningkatan produksi daging 1,01% (46.715,20 ton) 2. Persentase peningkatan produksi telur 1,24% (50.671,53 ton, Persentase peningkatan produksi susu -18,32% (137.560,57 ton)

2. Sejak awal Mei Tahun 2022 terdapat wabah virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang pada ternak besar (sapi Potong dan Sapi Perah) di Wilayah Kabupaten Malang.
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Tim Satgas Penanganan PMK di Kabupaten Malang telah melaksanakan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), penutupan pasar hewan, penjagaan pos lintas ternak, pemberian vitamin dan obat-obatan, pemberian desinfektan dan sosialisasi penanganan PMK ternak sapi perah dan sapi potong yang terdapat PMK 2022 untuk mencegah dan meminimalisir angka kesakitan dan kematian ternak di wilayah Kabupaten Malang.

### **Rekomendasi**

1. Pengembangan kawasan sentra produksi peternakan;
2. Pengembangan sumberdaya manusia bidang peternakan
3. Pengoptimalan pemanfaatan potensi sumberdaya alam peternakan.
4. Pengembangan pemanfaatan teknologi peternakan.
5. Pelayanan kesehatan hewan bagi ternak terus ditingkatkan melalui UPT Puskesmas serta masih perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan hewan di Kabupaten Malang.

### **L Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat**

- Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial masyarakat yang agamis, tertib dan berbudaya lokal.
- Sasaran Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan kehidupan sosial beragama.
- Peningkatan kegiatan kehidupan sosial beragama melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama
- Membina dan mengembangkan kegiatan keagamaan dan sosial budaya masyarakat yang menunjang terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang agamis, toleran dan harmonis

- Membina dan mengembangkan kegiatan keagamaan dan sosial budaya masyarakat yang menunjang terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang agamis, toleran dan harmonis
- Optimalisasi data jumlah tempat ibadah dan kebutuhan peningkatan kualitas sarana prasarana tempat ibadah

### **Rekomendasi**

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui Indeks Kesalehan Sosial (IKS)
2. Perlu adanya penyajian pencapaian target indikator pada masing-masing program sehingga hasil kinerja pada setiap tahunnya akan bisa dievaluasi secara maksimal.
3. Upaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan sesuai ajaran agama terhadap penyebaran aliran sesat dan adanya radikalsime perlu dilakukan sosialisasi dengan menyebarkan pesan-pesan keagamaan dan praktik beragama yang mencerahkan kehidupan yang dilakukan oleh penyuluh agama, tokoh agama, rohaniwan, dan tokoh masyarakat dan dengan menggunakan pendekatan persuasif dan inklusif

### **Catatan Strategis :**

1. Pemerataan aksesbilitas dan kuantitas Pendidikan karena masih ada kesenjangan antar sekolah di desa dan kota
2. Upaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama terhadap penyebaran aliran sesat dan adanya radikalsime perlu dilakukan sosialisasi dengan menyebarkan pesan-pesan keagamaan dan praktik beragama yang mencerahkan kehidupan yang dilakukan oleh penyuluh agama, tokoh agama, rohaniwan, dan tokoh masyarakat dan dengan menggunakan pendekatan persuasif dan inklusif
3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik serta pemerataan bazeting karena masih adanya kepala sekolah yang merangkap lebih dari satu sekolah
4. Melakukan strategi kebijakan daerah untuk menanggulangi kekurangan tenaga pendidik pada satuan SD-SMP negeri, yang kekurangan tenaga pendidik yang

memiliki kompetensi dan standar kualifikasi serta penempatan sesuai formasi dan tempat domisili,

5. Kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu dan di dukung Infrastruktur serta bangunan yang layak melalui DAK karena banyak bangunan sekolah yang rusak
6. Pengembangkan dan pembangunan Fasilitas kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah serta mendorong partisipasi masyarakat untuk mendirikan fasilitas kesehatan pada daerah yang sulit akses
7. Identifikasi potensi dan pusat-pusat pemberdayaan generasi muda potensial hingga ke tingkat desa.
8. Mendorong optimalisasi potensi daerah melalui pelibatan potensi masyarakat.
9. Meningkatkan upaya penekatan angka stunting dan gizi buruk sesuai target Pemerintah kabupaten Malang di Tahun 2024 dengan Nol stunting
10. Perlu mengeksplorasi dan mengedepankan ide-ide inovasi dalam pelayanan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.
11. Selalu meningkatkan perlindungan perempuan dan anak terhadap Tindakan kekerasan yang masih terjadi serta di tambah adanya kasus viral anak pejabat.
12. Meningkatkan peran individu, keluarga, komunitas dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan social kepada PMKS melalui peningkatan prosentase penerima bantuan tepat sasaran.
13. Pemerataan infrastruktur untuk pemulihan pariwisata khususnya di daerah yang memiliki peninggalan sejarah ex Candi Srigading Kecamatan lawing
14. Setiap pembiayaan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar sumber-sumber anggaran dapat digunakan secara optimal dan kesinambungan fiskal dapat terjaga

**Saudara Pimpinan dan segenap Anggota Pansus sekalian yang saya hormati,**

Demikian laporan Panitia Khusus Bidang (Kesejahteraan Rakyat) yang dapat kami sampaikan pada Rapat Paripurna (Internal) hari ini, dengan harapan semoga catatan strategis sebagaimana disampaikan di atas, sebagai Rekomendasi dokumen pemerintah, yang tentu saja akan menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi yang akan menjadi bahan rujukan dalam mewujudkan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan yang *clean and good goverment, good public service*.

Kami selaku juru bicara menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian paparan ada tindakan atau sikap kami yang kurang berkenan. Akhir kata "*Ihdhinas Shirotul Mustakim*"

*Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

***Sekian dan terimakasih,***

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

**JURU BICARA**

**KETUA**

**Drs. ABDUL ROKHIM**

**RAHMAT KARTALA**



DEMIKIAN TADI TELAH KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT.

KEPADA SAUDARA Drs. ABDUL ROKHIM SEBAGAI JURU BICARA, DISAMPAIKAN TERIMAKASIH.

**BAPAK, IBU DAN HADIRIN SEKALIAN,**

BARUSAJA KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS 4 (EMPAT) BIDANG PEMBAHAS LKPJ BUPATI MALANG TAHUN 2022.

DARI LAPORAN YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH JURU BICARA PANITIA KHUSUS MASING-MASING BIDANG, TERDAPAT POKOK HASIL BAHASAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI REKOMENDASI DPRD KABUPATEN MALANG, YANG AKAN DITUANGKAN DALAM **KEPUTUSAN DPRD**. HAL INI SEBAGAI CATATAN-CATATAN STRATEGIS DPRD KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG, UNTUK PERBAIKAN DAN/ATAU PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KE DEPAN.

BERDASARKAN PASAL 20 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, DISEBUTKAN BAHWA **HASIL PEMBAHASAN LKPJ, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MEMBERIKAN REKOMENDASI SEBAGAI BAHAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENYUSUNAN ANGGARAN PADA TAHUN BERJALAN DAN TAHUN BERIKUTNYA DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN KEPALA DAERAH, DAN/ATAU KEBIJAKAN STRATEGIS KEPALA DAERAH.**

UNTUK ITU DI HADAPAN SAUDARA TELAH DITAMPILKAN DRAFT KEPUTUSAN DPRD YANG DIMAKSUD, MOHON ANGGOTA DPRD DAPAT MEMBERIKAN KOREKSI.

DIPERSILAHKAN.....

..... *Proses Koreksi Draft Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi LKPJ Bupati Malang Tahun 2022.....*

TERIMA KASIH, APABILA SUDAH TIDAK ADA KOREKSI, MAKA DENGAN INI SAYA NYATAKAN BAHWA KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MALANG TENTANG REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG TAHUN 2022 DAPAT **DITETAPKAN (TOK!!! 1X).**

SELANJUTNYA MARI KITA SEPAKATI BERSAMA SIAPA YANG KITA TUNJUK SEBAGAI **JURU BICARA DPRD** UNTUK MENYAMPAIKAN REKOMENDASI YANG MERUPAKAN CATATAN - CATATAN STRATEGIS DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP LKPJ BUPATI MALANG TAHUN 2022 DALAM RAPAT PARIPURNA NANTI SIANG.

SIAPA JURU BICARA DPRD YANG DITUNJUK...?

..... **\*\*\*\*##\*\*\*\*** .....

TERIMA KASIH, DENGAN DEMIKIAN, **JURU BICARA DPRD** DALAM RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI MALANG TAHUN 2022 ADALAH SAUDARA ..... **(TOK!!! 1X).**

MEMASUKI ACARA TERAKHIR YAITU PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG TAHUN 2022.

KEPADA PETUGAS DIPERSILAHKAN UNTUK MEMANDU PROSES PENANDATANGANAN.....

.....Proses Penandatanganan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Malang Tahun 2022.....

(dipandu oleh petugas)



**RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,**

MAKA DENGAN MENGUCAP SYUKUR  
“**ALHAMDULILLAHIROBBILALAMIN**” RAPAT PARIPURNA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG, SAYA NYATAKAN  
DITUTUP.....(TOK!!! 3X)

**SEKIAN DAN TERIMA KASIH,**

**WALLAHUL MUWAFIQ ILA AQQWAMIT THARIEQ**

**WASSALAMU’ALAIKUM WR, WB.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG  
KETUA,**

**DARMADI, S.Sos**